BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019: ANALISIS PSIKOLOGI DAN MASLAHAH MURSALAH

Abdul Aziz

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman
muheabdulaziz@gmail.com

Abstract

Received:
10-12-2021
Revised:
16-12-2021
Published:
13-01-2022

This study aims to explain how the marriage age limit is in accordance with Law Number 16 of 2019 according to the Maslahah Mursalah theory. Marriage Law Number 1 of 1974 stipulates that marriage is only permitted if the prospective groom is 19 years old and the bride is 16 years old. With the passage of time, these provisions have become outdated and are not in accordance with the current situation both in terms of psychology, biological health, education, and economy. The age limit for marriage has undergone two Judicial Review submissions to the Constitutional Court regarding the age limit for marriage. Islam does not regulate the age limit for a person to get married. By increasing the marriage age for women to 19 years, in order to provide protection for children who are still underage so that they are more prepared biologically and psychologically. Therefore, it is suggested that this regulation can be used as a reference and applied to prevent underage marriages.

Keywords: *Maslahah Mursalah, Psychology, Marriage, Age of Marriage*

Abstrak

Diterima:
10-12-2021
Direvisi:
16-12-2021
Dipublikasi:
13-01-2022

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana kesesuaian batas usia nikah pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menurut teori Maslahah Mursalah. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki berusia 19 tahun dan mempelai wanita berusia 16 tahun. Dengan seiring berjalannya waktu ketentuan tersebut telah

ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan keadaan saat ini baik dari segi psikologis, kesehatan biologis, pendidikan, maupun ekonomi. Batas usia perkawinan telah mengalami dua kali diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia menikah. Islam tidak mengatur mengenai batasan usia seseorang bisa menikah, Dengan dinaikannya usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, agar memberikan perlindungan terhadap anak yang masih dibawah umur agar lebih siap secara biologis maupun psikologisnya. Oleh sebab itu, maka disarankan peraturan ini bisa dijadikan acuan dan diterapkan agar tidak terjadinya perkawinan dibawah umur.

Kata Kunci : Masalah Mursalah, Mempelai, Perkawinan, Usia Nikah

PENDAHULUAN

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja. Islam tidak pernah menetapkan adanya batasan minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah. Umur atau kedewasaan tidak termasuk ke dalam syarat rukun nikah, tetapi sangat penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis dan sosial.¹

Suatu perkawinan itu hukumnya sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun, namun pelaksanaan pernikahan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung: Focus Media, 2005), 1.

hikmah dari pernikahan itu sendiri.² Hal ini dijelaskan didalam pasal 7, bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.³ Dalam konteks ini, pengertian perkawinan telah melampaui interpretasi kitab-kitab klasik yang hanya menekankan bolehnya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan (*alwath*). Sementara dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, layaknya suatu interpestasi nilai yang diberikan oleh masyarakat yang tengah dilanda arus modernisasi.⁴

Jika dilihat dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di negara kita, ditemukan bahwa terdapat pasal yang mengatur batasan usia yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. Undang-undang diciptakan untuk mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat yang merupakan ijthaddari pembuat undang-undang itu sendiri demi kemaslahatan rakyat yang sesuai sosio-kultur Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hukum harus dapat membaca situasi masyarakat yang dalam hal ini menjadi obyek daripada hukum dan sendisendi hukum antara lain memperhatikan kemaslahatan, keadilan dan tidak membebani pengguna hukum tersebut.⁵

Perwujudan hukum ini secara umum didasari oleh semangat tujuan syara', yaitu untuk mencapai kemaslahatan

² Moh.Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Ahkam, 2017), 394.

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) Tentang Perkawinan.

⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 203.

⁵ Hasby As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1989), 7.

seluruh manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, sehingga berlakunya suatu hukum diharapkan menjadi suatu sarana untuk mencapai kemaslahatan umat tersebut dan demi terwujudnya tujuan disyariatkannya Islam. Tujuannya adalah memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda dan kehormatan.⁶

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang usia perkawinan, di antaranya ialah Akhmad Shodikin,⁷ Ahmad Masfuful Fuad⁸ dan Asman.⁹ Menurut hemat penulis, belum ada yang secara spesifik membahasnya batasan usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dan masalah mursalah. Berangkat dari uraian di atas, maka penulis fokus menganalisa mengapa terdapat batasan umur atau usia yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai ketika akan melaksanakan suatu ikatan perkawinan dalam perspektif psikologi dan hukum Islam, serta akibat hukumnya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah penelitian yang menggunakan buku sebagai sumber

⁶ Muhammad Syah Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1982), 5.

⁷ Akhmad Shodikin, "Pendangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.423>.

⁸ Ahmad Masfuful Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 1, no. 1 (1 April 2016), <https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.77>.

⁹ Asman, "Early Age Marriage Ditinjau dari UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Analisis Konsep Hukum Islam," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.506>.

data dan penulis berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.¹⁰ Berdasarkan judul yang penulis angkat maka jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (hukum normatif). Pendekatan yuridis normatif yang penulis gunakan dalam melihat obyek hukum ialah menggunakan teori *maslahah mursalah* dengan melihat dari perspektif manfaat yang ditimbulkan suatu peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Konsep Maslahah Mursalah

Secara bahasa *maslahah* berasal dari bahasa Arab yang berarti manfa'at, faidah, bagus, guna atau kegunaan. Kata *maslahah* diambil dari kata kerja *shalaha-yasluhu* menjadi *sulhan-maslahatan*. yang mengikuti *wazan* (pola) *fa'ala-yaf'ulu*.¹¹ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata *maslahah* bermakna sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat atau kepentingan.¹² Dalam struktur bahasa Arab, kata *maslahah* merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-masalih*. Menurut ibn Mandzur, *al-maslahah* mempunyai dua arti: Pertama sama dengan makna *al-shalah*. Kedua, sepadan dengan kata *almasalih* (jamak). Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan pencagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *maslahah*.¹³

¹⁰ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 40.

¹¹ Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119), 1678.

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 923.

¹³ Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab...*, 1678.

Pengertian *maslahah* secara istilah dapat ditemukan pada kajian *ushuliyin* saat membicarakan *munasib*, dan pada saat membicarakan *maslahah* sebagai dalil hukum, ada beberapa rumusan definisi *maslahah* menurut istilah, yakni sebagai berikut: Dalam pandangan al-Buthi, *maslahah* adalah manfaat yang ditetapkan shari' untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sendiri sesuai dengan urutan tertentu.¹⁴ Dari definisi ini, tampak yang mejadi tolok ukur *maslahah* adalah tujuan-tujuan shara' atau berdasarkan ketetapan shari'. Meskipun kelihatan bertentangan dengan tujuan manusia yang sering kali dilandaskan pada hawa nafsu semata.

Selanjutnya, terdapat imam al-Syaukani yang memaknai *maslahah* secara terperinci, menurutnya *maslahah* memiliki makna yang berbeda-beda, *maslahah* adakalanya disebut *al-munasabah* karena untuk mendapatkan kepastian hukum dari permasalahan yang tidak ada dalilnya seseorang dapat melakukan *munasabah*, yaitu membandingkan dengan permasalahan nas al-Qur'an. Adakalanya *maslahah* disebut dengan *al-Halat*, karena mungkin juga manusia menduga-duga adanya kemanfaatan dibalik suatu hukum. *Maslahah* disebut dengan *ri'ayah al-maqasid*, Karena dengan mewujudkan kemaslahatan berarti mewujudkan dan menjaga tujuan shara', yaitu kemaslahatan umum. Lebih jelasnya ia berpendapat bahwa *maslahah* adalah sesuatu yang perlu untuk dilestarikan dan sejalan dengan keinginan manusia untuk menarik manfaat dan menolak bahaya.¹⁵

Imam al-Syatibi mengklarifikasikan *maslahah* menjadi dua bagian, *maslahah* dari keberaannya didunia dan dari aspek hubungannya dengan statemen shari'ah (*khitb*

¹⁴ Said Ramdhan Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah Al- Risalah, 1977), 45.

¹⁵ Al-Syaukani, *Irsyad al- Fuhul*, (Beirut: Dar al-Fikr), 67.

shari'ah). Dalam kaitanya keberadaanya didunia, masalah berarti sesuatu yang membicarakan penegakan kehidupan manusia dan pencapaian segala sesuatu yang dianut oleh kualitaas intelektual dan emosinya. Oleh karena itu dalam dataran praktis, masalah berhubungan erat dengan sesuatu yang lazim dimasyarakat yang disebut adat. Sedangkan dari aspek kedua, segala sesuatunya kembali lagi keketentuan ketentuan shari'ah. Dalam hal ini, apabila shari' menuntut sesuatu itu dikerjakan oleh manusia berarti masalah dan apabila dilarang berarti *mafsadah*.¹⁶ Adapun menurut al-Ghazali, dia menjelaskan bahwa secara harfiah masalah adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian. Namun yang dikehendaki dalam kpembahasan masalah ini bukanlah pengertian tersebut, akan tetapi melestarikan tujuan- tujuan shari'at. Seadangkan tujuan shari'at pada makhluk mencakup lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Karenanya setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah masalah. Sedangkan hal-hal yang menghambat pencapaian prinsip-prinsip ini disebut mafsadah, dan menololak atas mafsadah adalah suatu masalah.¹⁷

Al-Tufi memiliki definisi tersendiri terkait dengan mashlahah, ia mendefinisikan masalah menurut '*urf* (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa pada kemaslahatan (manfaat). Dengan demikian al-Tufi ingin menegaskan bahwa *masalah* yang ingin di kehendaki hukum Islam tidak sama dengan apa yang dikehendaki manusia.¹⁸ Yang terahir pengertian *masalah* menurut Wahbah al-Zuhaili.dia menawarkan

¹⁶ Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al- syatibi, *al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Tsaqafah,tt), 26.

¹⁷ Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa Min Ilmi Ushul*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 15.

¹⁸ Khairul Umam dkk, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 56.

sebuah definisi yang dianggap akodatif dan dapat menjelaskan hakikat *masalahah*, ia menuturkan bahwa *masalahah* adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan shari'ah dan tujuan-tujuannya, namun tidak ada dalil secara spesifik mengungkapkan atau menolaknya, dengan proyeksi mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan mafsadah (kerusakan).¹⁹

Dari uraian definisi dan sedikit penjelasan diatas, penulis lebih sepakat dengan pengertian masalah yang terahir yaitu menurut Wahbah al-Zuhaili. Karena pengertian tersebut mampu mengakomodasi dan sekaligus menjelaskan hakikat masalah. Dengan bahasa yang sederhana, masalah adalah setiap hal yang mengandung kemanfaatan namun tidak ada nas tertentu yang menguatkannya akan tetapi masih sesuai dengan prinsip syara'.

B. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perubahan Batasan Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Sebagaimana diketahui bahwa pembaharuan hukum Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntunan zaman. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh sudah tidak mampu lagi memberikan solusi terhadap berbagai masalah pada zaman yang semakin berkembang ini. Abdul Manan menyebutkan dalam bukunya.²⁰

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia pembaharuan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: *pertama*, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al Fikr), 12.

²⁰ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), 102.

dalam kitab-kitab fiqih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan. *Kedua*, pengaruh globalisasi ekonomi dan Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. Pembaharuan hukum Islam di Indonesia terjadi karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah di jelaskan diatas. Perubahan ini adalah sejalan dengan teori qaul qadim dan qaul jaded yang dikemukakan oleh Imam Syafii, bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang ditetapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan *maqashid al-syari'ah*.²¹ Pembaharuan hukum perlu dilaksanakan secara terus menerus karena hasil ijjihad selalu relatif, sedangkan kebenaran perlu di ditemukan atau didekatkan sedekat mungkin. Oleh karena itu, ijtiihad sebagai mode penemuan kebenaran itu perlu terus dilaksanakan. Itulah sebabnya jawabanterhadap masalah baru senantiasa harus bersifat baru pula. Ijtihad tidak pernah tertutup dan setiap saat harus selalu terbuka untuk menemukan jawaban terhadap hukum baru dalam menghadapi arus globalisasi yang terjadi saat ini.

Penetapan batas usia perkawinan tidak ada ketentuan yang mengatur secara pasti dalam Hukum Islam, karena tidak terdapat dalil yang mengatur baik itu di dalam Al-Qur'an maupun sunah. Sehingga dalam hal ini memang terjadi kekosongan hukum, untuk itu perlu di perbaharui mengenai aturan batas usia perkawinan. Dengan menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18

²¹ Abdul Manan, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia...,103.

tahun,²² Selain itu juga bertujuan untuk menekan angka perceraian, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, mendapatkan keturunan yang sehat, dan memenuhi hak anak berupa tumbuh kembang anak sampai mendapat pendidikan setinggi mungkin. Oleh karena itu, maka lahirilah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.²³

Penulis setuju dengan keputusan Pemerintah dalam merubah usia perkawinan. Keputusan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini dengan semakin modernnya perkembangan zaman. Penulis sepakat untuk menyamakan usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki yakni setara menjadi 19 tahun. Karena 19 tahun itu adalah usia yang pas untuk menikah dan telah terwujudnya tujuan hukum itu sendiri, yaitu telah memberikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sehingga dapat mengurangi angka perceraian karena faktor usia yang terlalu muda. Adapun menurut pandangan penulis apabila dikaitkan dengan teori masalah, Perubahan batas usia termasuk kedalam kategori masalah dari segi kebutuhan yaitu masalah dharuriyat. *Maslahah Dharuriyah* adalah kemaslahatanyang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia.²⁴ Karena dari segi pentingnya batas usia perlunya dilakukan perubahan demi memelihara kebutuhan pokok manusia yaitu mendapat perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional serta diperlakukan sama didalam hukum.²⁵

Jika dilihat dari segi keberadaannya, perubahan usia menikah termasuk kedalam *masalah mursalah* yaitu

²² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²³ Update Indonesia, Vol. IV, No.10 Maret 2010, 3.

²⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2005), 305.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), cet.4, 371.

kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Perubahan batas usia menjadi 19 tahun telah sesuai dengan teori yang terdapat dalam hukum Islam *masalah mursalah* yakni, "mengambil manfaat dan menolak mudharat". *Maslahah* sangat peduli terhadap kebutuhan manusia pada saat perkembangan zaman ini. Serta tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam. Walaupun hukum Islam tidak memberikan batasan minimal usia menikah, namun Islam memberi tolak ukur bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan dengan syarat seseorang tersebut sudah *mukallaf*.²⁶ Dalam kacamata hukum Islam, perubahan batas usia perkawinan secara umum telah sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqasid syari'ah*) meliputi lima prinsip, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Seperti diantaranya yaitu dalam menjaga keselamatan jiwa anak (*hifshu al-nafs*) dalam menjaga pendidikan anak (*hifzhu al-aql*) dan dalam menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*).²⁷

Memelihara jiwa, yaitu dalam menjaga keselamatan tubuh yakni kesiapan ketika nanti akan hamil dan melahirkan, serta menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Kesehatan bagi perempuan yang telah dijamin pemenuhannya dalam UUD 1945 tercapai maka batas minimal usia menikah bagi perempuan di dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan perlu dinaikkan. Memelihara akal yaitu untuk menghilangkan ketertinggalan posisi perempuan dalam bidang pendidikan dengan laki-laki. Kebanyakan perempuan yang menikah diusia muda cenderung berhenti sekolah. Batas usia menikah perlu dinaikkan agar bukan hanya laki-laki saja yang dapat menikmati wajib belajar 12 tahun, namun perempuan juga

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*... ,394.

²⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: PT Grafindo Persada,2014), 116.

dapat merasakan pemenuhan hak memperoleh pendidikan wajib belajar 12 tahun yang telah diberikan oleh UUD 1945.

Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) yaitu menjaga keselamatan keturunan.²⁸ Memelihara keturunan seperti disyariatkannya nikah dan larangan berzina. Kalau aturan ini tidak dipatuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan. Dengan di naikkannya usia yang ideal untuk menikah bagi calon ibu agar melahirkan penerus bangsa yang sehat dan berkualitas serta mengurangi tingkat keguguran. Jika dilihat dari sudut pandang kedokteran, menikah di usia muda mempunyai dampak negative baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, menikah di usia muda dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda, dan cara berfikir yang masih belum matang.²⁹

Ditetapkannya usia 19 tahun ini sudah mampu mengontrol secara baik, artinya setiap melakukan suatu tindakan penuh dengan kehati-hatian dan juga pertimbangan. Maka secara otomatis ini akan berdampak terhadap pencegahan kenaikan angka perceraian dan mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negative. Tentunya dengan upaya-upaya yang telah dibuat oleh pemerintah dan juga melalui usulan rakyat maka dengan begitu Undang-Undang perkawinan ini dapat diterima oleh masyarakat. Dan juga ini akan memberikan dampak yang baik sebagai penunjang untuk bisa menjadi Bangsa yang maju lewat pengoptimalisasian keluarga yang berkualitas dengan cara menaikkan dan menyetarakan batas usia perkawinan. Oleh

²⁸ Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 228.

²⁹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), 56.

karenanya, pemerintah hanya mentoleransi pernikahan di atas umur 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk perempuan.

C. Tinjauan Psikologi terhadap Usia Perkawinan

Perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang pria dan seorang wanita. Diantara tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Setiap pasangan yang hendak menikah perlu perencanaan yang matang, terutama dalam hal pengelolaan keuangan, tempat tinggal dan sebagainya, dengan tujuan rumah tangga tidak gagap ketika menghadapi masalah keluarga.³⁰ Seorang laki dan perempuan yang akan menikah harus memiliki kematangan fisik dan mental sebelum memasuki dunia pernikahan. Hal ini tentu ada erat kaitannya dengan usia calon pengantin. Karena ini, usia menikah lebih tergantung pada kondisi jasmani dan kemauan membangun mentalitas mahligai rumah tangga.³¹

Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia, usia adalah salah satu komponen yang dipelajari oleh psikologi, dalam perspektif psikologi bahwa jiwa manusia dibagi menjadi tiga fase. *Fase pertama* menyangkut anak-anak (0-12 tahun). Pada fase ini, anak akan mulai mengalami perkembangan perilaku. Di antara perkembangan perilaku tersebut adalah perilaku tertutup atau perilaku tersembunyi, seperti persepsi, ingatan, perhatian (*perseption, attention, memory*), dan perilaku

³⁰ Ongky Alexander, "Tinjauan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Psikologis dan Hukum Islam", *el-Ghiroh*. Vol. XVIII, No. 01. Februari 2020, 71.

³¹ Yusuf, *Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam*, *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, 203.

terbuka, yakni perilaku yang langsung terlihat seperti berjalan, berlari, tertawa, menulis.

Tingkah laku seseorang juga berubah, bahkan perubahan yang sama akan tampak pada usia dalam batas-batas tertentu. Akhirnya dapat dilihat bahwa manusia ternyata mengalami perkembangan mental. Di samping perkembangan tingkah laku, pada fase ini juga akan merasakan perkembangan kepribadian. Pembentukan kesadaran sebagai inti pribadi, panduan perilaku dan sensor keinginan yang tidak wajar disalurkan dengan tiga sifat. Yang pertama adalah sifat egois mulai terkikis dan sifat perhatian kepada orang lain mulai tumbuh. Yang kedua adalah rasa ingin tahu yang tersalurkan melalui pertanyaan yang menuntut jawaban. Yang ketiga adalah budaya disiplin dan rasa tanggung jawab mulai tertanam.³²

Fase kedua adalah masa remaja (13-21). Masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak usia 12 tahun, beranjak menuju masa dewasa usia 21 tahun. Pada setiap tahap usia ini, seseorang merasakan dan mengalami kemajuan yang telah dicapai. Jika orang tersebut mengalami sebuah kegagalan dalam tugas-tugas perkembangan, maka orang tersebut akan mendapatkan masalah pada tahap perkembangan selanjutnya.³³

Fase Ketiga adalah masa dewasa (*edolesen*), yaitu masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa awal, dimana fase ini merupakan fase penutup masa remaja. Biasanya terjadi pada usia 21 tahun.³⁴ Fase Edolesen ini tidak berlangsung lama, karena jika seseorang telah mencapai fase ini, maka mereka tidak membutuhkan waktu yang lama

³² Yusuf, *Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam*, JIL: *Journal of Islamic Law*..., 204.

³³ Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Aksara Baru, 2006), 11.

³⁴ Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 11.

untuk mencapai usia dewasa. Sikap yang terjadi pada seseorang yang sedang dalam fase edolesen ini adalah mereka mulai dapat menemukan identitas dirinya, menjadi jelas dan lebih terarah serta mampu akuntabel dan dapat menetapkan standar sendiri.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi perceraian bagi pasangan suami istri adalah kurangnya kedewasaan dalam menghadapi masalah keluarga. Banyaknya pernikahan yang belum mencapai usia kematangan sangat berdampak pada psikologi seseorang diantaranya, mudah bagi pasangan suami istri untuk bercerai, bahkan pada kenyataannya yang menuntut gugat cerai adalah istrinya. Artinya dalam hal ini kedewasaan harus diperhatikan bagi pasangan yang ingin menikah. Sesungguhnya persoalan usia untuk pasangan yang ingin menikah bukan masalah, tapi untuk pasangan setelah menikah pada usia ini akan menunjukkan sifat dan karakter sejati mereka. Karena usia seseorang secara tidak langsung mempengaruhi alam dan karakternya dan pengaruh keluarganya. Ketika usia itu belum dewasa umumnya mudah tersinggung, mudah cemburu, tertutup, pendiam, dan tidak bisa mengendalikan emosinya.

Selain itu, masalah reproduksi terkait usia juga mempengaruhi wanita belum cukup dewasa. Umumnya wanita suka emosional dan tidak stabil sehingga mempengaruhi bayi. Kehamilan yang baik tentunya akan menghasilkan anak yang baik pula. Begitu pula sebaliknya saat reproduksi tidak sehat tentunya akan berakibat buruk bahkan fatal bagi ibu dan bayi.

Perkembangan kepribadian seseorang terlihat dari faktor genetik dan kedewasaan memainkan peran penting dalam perkembangan kepribadian seseorang. Dari proses genetik dan pematangan yang melekat pada jiwa manusia setiap saat dalam kehidupan individu seseorang. Persoalan

kehidupan di usia muda pada umumnya adalah persoalan kebutuhan ekonomi. terlebih wanita yang menikah muda harus menghadapi masalah lingkungan dan sosial. Karena itu mereka harus mampu bertahan untuk mengatasi stres dan tekanan yang muncul dalam kehidupan keluarga. Menurut survey di lapangan bahwa dampak yang terjadi akibat perkawinan di usia muda antara lain kekerasan dalam rumah tangga, risiko tinggi kematian ibu dan rendahnya hak atas kesehatan reproduksi.³⁵

Adapun untuk memperoleh perkawinan yang harmonis, yakni keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, penting untuk calon pasangan yang hendak menikah untuk memahami dan menguasai ilmu psikologi keluarga agar tetap terjaga keharmonisan hubungan yang menjadi dambaan setiap orang yang berkeluarga. Pengetahuan tentang psikologi keluarga juga akan berguna untuk menghadapi masalah keluarga yang mungkin akan timbul, sehingga setiap keluarga dengan mudah menerimanya sebagai bagian dari dinamika kehidupan keluarga yang membutuhkan solusi bersama.³⁶

PENUTUP

Usia yang ideal untuk menikah adalah 19 tahun tanpa adanya perbedaan laki-laki maupun perempuan. Batas usia perkawinan sebagaimana tertulis dalam UU No 16 tahun 2019 dalam pasal 7 ayat 1 berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Sedangkan di dalam Hukum Islam tidak ada batasan yang mengatur usia

³⁵ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. (BKKBN), *Pernikahan dini pada beberapa provinsi di Indonesia: dampak overpopulation, akar masalah dan peran kelembagaan di daerah*. Jakarta (ID): BKKBN. 2011.

³⁶ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: Bina Reka Pariwisata, 2005), 12.

seseorang untuk menikah. Hanya saja dianjurkan apabila seseorang telah mencapai usia baligh, berakal, mumayyiz serta telah mapan secara finansial dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk.

Perubahan usia menikah termasuk ke dalam masalah mursalah yaitu kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya, karena masalah menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Perubahan batas usia menjadi 19 tahun telah sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan memelihara keturunan. Artinya dengan di naikkannya batas usia perkawinan pada perempuan dapat menyelamatkan jiwa dari kehamilan pada usia yang masih muda serta menjaga keturunan agar melahirkan penerus bangsa yang sehat dan berkualitas serta mengurangi tingkat keguguran. Peraturan ini telah sesuai dengan teori yang terdapat dalam hukum Islam yakni, meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan mafsadah. Pernikahan di bawah umur lebih banyak memberi dampak negative dibandingkan dampak positif terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Karena pernikahan dibawah usia 19 dinilai belum matang dari segi psikologinya menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Dilihat dari segi kesehatan terdapat berbagai dampak negatife yang dirasakan bagi wanita yang menikah dibawah umur yaitu berpengaruh pada kesehatan ibu, rentan terkena HIV/AIDS karena sistem kekebalan sang ibu yang belum matang. Bahkan berdampak terhadap kematian yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- al- syatibi, Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad. *al-Muwafaqat*. Beirut: Dar al-Tsaqafah, tt.
- al-Buthi, Said Ramdhan. *Dhawabit Al-Maslahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah Al- Risalah, 1977.
- Alexander, Ongky. "Tinjauan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Psikologis dan Hukum Islam", *el-Ghiroh*. Vol. XVIII, No. 01. Februari 2020.
- al-Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad. *al-Mustasyfa Min 'Ilmi Ushul*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, tt..
- al-Syaukani, *Irsyad al- Fuhul*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al Fikr.
- Asman, "Early Age Marriage Ditinjau dari UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Analisis Konsep Hukum Islam," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.506>.
- as-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1989.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. (BKKBN), *Pernikahan dini pada beberapa provinsi di Indonesia: dampak overpopulation, akar masalah dan peran kelembagaan di daerah*. Jakarta (ID): BKKBN. 2011.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Fuad, Ahmad Masfuful. "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 1, no. 1 (1 April 2016), <https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.77>.

- Ismail, Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1982), 5.
- Jalaludin. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014..
- Manan, Abdul. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Prenada Media Grup, 2005.
- Mandzur, Ibn. *Lisan al-Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119.
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Bina Reka Pariwara, 2005.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) Tentang Perkawinan.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: Focus Media, 2005.
- Shidiq, Saipudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Shodikin, Akhmad. "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.423>.
- Sujanto, Agus. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Aksara Baru, 2006.
- Umam, Khairul dkk. *Ushul Fiqh I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Wafa, Moh.Ali.Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam. Jakarta: Ahkam, 2017.

Yusuf. "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam", *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020.